BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuesioner terdiri dari 40 butir pernyataan dengan perincian 15 butir pernyataan mengenai penyajian neraca daerah, 14 butir pernyataan mengenai pengawasan intern dan 11 butir pernyataan tentang akuntabilitas keuangan daerah. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan metode alternatif *partial least square* sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah

Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula

bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bandung (lembaran negara repoblik indonesia nomor 82 tahun 2007). Yang mengatur tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintahan kota bandung diatur oleh peraturan pemerintah daerah kota bandung yang telah diubah denga peraturan daerah kota bandung nomor 06 tahun 2008. Dan dalam peraturan menrti dalam negri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Adapun Visi dan Misi dari dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintahan kota bandung adalah

1. Visi

   "Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat)".

2. Misi

   a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
   b. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
   c. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
   d. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
   e. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

f. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pemerintahan kota bandung Dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada kota bandung terdiri dari :

a. Staf Ahli
b. 17 Dinas Pemerintahan Kota.
c. Kecamatan Dan Kelurahan.
d. Sekretariat Daerah.
e. DPRD
f. Perusahaan Daerah.
g. Lembaga Teknis Daerah.

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung, dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas daerah kota bandung sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari :

a. Dinas pendidikan.
b. Dinas kesehatan.
c. Dinas sosial.

d. Dinas tenaga kerja.
e. Dinas perhubungan.
f. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
g. Dinas kebudayaan dan pariwisata.
h. Dinas tata ruang dan cipta karya.
i. Dinas bina marga dan pengairan.
j. Dinas pemakaman dan pertamanan.
k. Dinas kebakaran,
l. Dinas koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan.
m. Dinas pertanian dan ketahanan pangan.
n. Dinas pendapatan.
o. Dinas komunikasi dan informatika.
p. Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah
q. Dinas pemuda dan olah raga.

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada lampiran.

4.1.1.3 Uraian Tugas Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian :

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merusmuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan pada masing – masing dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
c. Mebina bawahan dilingkungan dinas dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktifitas kerja.
d. Memantau mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset daya aperatur pengelolaan keuangan daerah.
e. Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaaan penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan invstasi dan aset daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok malaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengkoordinasian tugas – tugas bidang maisng – maisng dinas.

3. Sub Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Sub Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris bagian lingkup keuangan dan program melakukan aktifitas pengkoordinasian dan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD).
5. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yan menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup anggaran, serta menyusun rencana program di bidang anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yang menjadi kewenagan di bidang keuangan aset lingkup perbendaharaan, serta mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang belanja langsung dan tidak langsung serta pembiayaan dan manajemen kas sebagai bahan rumusan kebijakan.
7. Bidang pemberayaan aset mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing – masing SKPD.

8. Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok mengkaji dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatan dan pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan.

4.1.1.4 Kegiatan Dinas

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, Kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota berbasiskan potensi daerah daerah.
3. Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.
4. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota .
6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kota.

4.1.1.5 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebanyak 34 responden dari karyawan – karyawati Dinas SKPD Kota Bandung dari bagian

Keuangan dan Pengawasan Umum. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
1	Wanita	12	35,3%
2	Pria	22	64,7%
	Jumlah	**34**	**100%**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2013

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 35,3%, dan responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 64,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini penelitian ini berjenis kelamin pria. Hal ini disebabkan, kuesioner yang dibagikan kepada Dinas Pemerintahan Kota Bandung lebih banyak responden pria dan pada kenyataannya pegawai pria lebih banyak daripada pegawai wanita pada Dinas Pemerintahan Kota Bandung.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia
Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
<30 Tahun	6	17,64%
31-40 Tahun	18	52,94%
41-50 Tahun	7	20,60%
>50Tahun	3	8,82%
Jumlah	**34**	**100 %**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2013

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara kurang dari 30 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 17,64%, 31 - 40 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 52,94%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 20,60%, dan yang lebih dari 50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 8,82%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40% tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma 3	4	11,76%
S1	20	58,82%
S2	9	26,47%
S3	1	2,95%
Jumlah	**34**	**100%**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2013

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 4 orang atau sebesar 11,76%, responden dan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 20 orang atau sebesar 58,82% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 26,47%, sedangkan sisanya sebanyak 1 orang atau sebesar 2,95% responden dengan pendidikan akhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti Kepala Dinas beserta staf nya pada dinas SKPD di Pemerintahan Kota Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu tidak sedikit pula terdapat responden dalam penelitian ini sedang dalam menyelesaikan tingkat pendidikan S2.

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.2.1 Uji Validitas

Seperti yang telah dijelaskan di Bab 3 dan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total = 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,30 berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi . Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut

mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Kuesioner Penyajian Neraca Daerah

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,347	0,30	Valid
Item 2	0,376	0,30	Valid
Item 3	0,421	0,30	Valid
Item 4	0,560	0,30	Valid
Item 5	0,331	0,30	Valid
Item 6	0,550	0,30	Valid
Item 7	0,328	0,30	Valid
Item 8	0,442	0,30	Valid
Item 9	0,398	0,30	Valid
Item 10	0,581	0,30	Valid
Item 11	0,431	0,30	Valid
Item 12	0,519	0,30	Valid
Item 13	0,457	0,30	Valid
Item 14	0,480	0,30	Valid
Item 15	0,456	0,30	Valid

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengawasan Intern

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 16	0,747	0,30	Valid
Item 17	0,427	0,30	Valid
Item 18	0,562	0,30	Valid
Item 19	0,544	0,30	Valid
Item 20	0,555	0,30	Valid
Item 21	0,315	0,30	Valid
Item 22	0,512	0,30	Valid
Item 23	0,398	0,30	Valid
Item 24	0,355	0,30	Valid
Item 25	0,662	0,30	Valid
Item 26	0,517	0,30	Valid
Item 27	0,634	0,30	Valid
Item 28	0,419	0,30	Valid
Item 29	0,415	0,30	Valid

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Kuesioner Akuntabilitas Keuangan Daerah

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 30	0,603	0,30	Valid
Item 31	0,351	0,30	Valid
Item 32	0,396	0,30	Valid
Item 33	0,580	0,30	Valid
Item 34	0,627	0,30	Valid
Item 35	0,384	0,30	Valid
Item 36	0,477	0,30	Valid
Item 37	0,533	0,30	Valid
Item 38	0,403	0,30	Valid
Item 39	0,544	0,30	Valid
Item 40	0,571	0,30	Valid

Pada ketiga tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi setiap butir pernyataan dengan total item lainnya lebih besar dari nilai 0,30, hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan pada ketiga variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Suatu alat ukur disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Koefisien Reliabilitas	Nilai kritis	Keterangan
Penyajian neraca daerah	0,741	0,70	Reliable
Pengawasan intern	0,890	0,70	Reliable
Akuntabilitas keuangan daerah	0,839	0,70	Reliable

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan pada ketiga variabel sudah andal karena memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70.

4.1.3 Analisis Deskriptif Hasil Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden diadopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\%\boldsymbol{Skor\ Aktual} = \frac{\boldsymbol{Skor\ Aktual}}{\boldsymbol{Skor\ Ideal}} \boldsymbol{X\ 100\%}$$

Sumber :Sugiyono (2009;135)

Keterangan :

Skor aktual = jumlah skor jawaban responden

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden x jumlah pernyataan x 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada table berikut :

Tabel 4.8
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No	% Skor	Kriteria
1	20.00% - 36.00%	Sangat Buruk / Sangar Rendah
2	36.01% - 52.00%	Buruk / Rendah
3	52.01% - 68.00%	Cukup Baik / Sedang
4	68.01% - 84.00%	Baik / Tinggi
5	84.01% - 100%	Sangat Baik / Sangat Tinggi

Sumber : Umi Narimawati (2010:46)

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Penyajian Neraca Daerah

Penyajian neraca daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penyajian neraca daerah diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 15 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang penyajian neraca daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung maka dilakukan

perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

1. Melakukan Penilaian Penyesuaian Asset dan Kewajiban

Tabel 4.9 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penilaian penyesuaian asset dan kewajiban.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penilaian Penyesuaian Asset dan Kewajiban

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor Actual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Penyesuaian asset dan kewajiban untuk penilaian piutang	F	13	5	3	11	2	118	170	69,41	Baik
	%	38,2	14,7	8,8	32,4	5,9				
Penyesuaian asset dan kewajiban untuk penilaian penerimaan daerah	F	6	13	6	8	1	117	170	68,82	Baik
	%	17,6	38,2	17,6	23,5	2,9				
Penyesuaian asset dan kewajiban hanya untuk penilaian penerimaan daerah	F	2	4	13	8	7	88	170	51,76	Buruk
	%	5,9	11,8	38,2	23,5	20,6				
		Total					**323**	**510**	**63,33**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.9 diatas bahwa penyesuaian aset dankewajiban di SKPD Kota Bandung cukup. Hal ini bisa diketahui dari presentasi akumulasi skor jawaban respondensebesar 63,33 berada di interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup.

a. Penyesuaian asset dan kewajiban untuk penilaian piutang.

Persentase skor tanggapan responden sebesar 69,41 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung selalu melakukan penyesuaian asset yaitu sebesar 38,2%, dengan alasan karena masih ada piutang yang tidak tertagih hal ini sesuai dengan

fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung yaitu masih kurangnya penerimaan daerah, volume pekerjaan atau barang semua terjadi karena adanya piutang atau pinjaman yang tidak tertagih. Namun banyak juga Dinas tidak melakukan penyesuaian asset dengan alasan tidak ada piutang yang tidak tertagih yaitu skor sebesar 32,4%.

b. **Selanjutnya penyesuaian asset dan kewajiban untuk penilaian penerimaan daerah**. Persentase skor tanggapan responden sebesar 68,82 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung sering melakukan penyesuaian asset dan kewajiban untuk penilaian daerah dengan alasan masih banyak penerimaan daerah yang belum tercatat hal ini sesuai fenomena yang terjadi mengenai masalah pencatatan yang masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung yang masih banyak yang belum terdata atau tercatat selebihnya dengan skor tanggapan 23,5% tidak melakukan penyesuaian asset dengan alasan semua penerimaan daerah sudah tercatat dengan baik. Dengan keadaan seperti ini Dinas Pemerintah Kota Bandung belum bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang ada.

c. **Penyesuaian asset dan kewajiban hanya untuk penilaian penerimaan daerah.** Persentase skor tanggapan responden sebesar 51,76 berada dalam interval 36 – 52 termasuk dalam kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak Dinas di Pemerintah

Daerah Kota Bandung meragukan bahwa penyesuaian asset dan kewajiban hanya untuk penilaian penerimaan daerah. Namun banyak juga Dinas yang setuju bahwa penyesuaian asset dan kewajiban hanya untuk penilaian penerimaan daerah. Dengan kasus seperti ini,dapat disimpulkan selama ini Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan penyesesuain asset dan kewajiban untuk penerimaan daerah saja.

2. Memberikan Kejelasan Kepada Tim Yang Akan Menyusun Neraca

Tabel 4.10 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penjelasan Kepada Tim Yang Akan Menyusun Neraca

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Seleksi penerimaan tim penyesuaian neraca	F	7	7	16	3	1	118	170	69,41	Baik
	%	20,6	20,6	47,1	8,8	2,9				
Tim penyesuaian neraca diambil dari orang yang latar belakang tidak mendukung dengan ruang lingkup pekerjaan	F	7	13	10	4	0	125	170	73,53	Baik
	%	20,6	38,2	29,4	11,8	0,0				
		Total					**243**	**340**	**71,47**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.10 diatas bahwa penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca baik. Hal ini bisa diketahui dari persentasi akumulasi jawaban responden sebesar 71,47 berada diantara interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik.

a. **Seleksi penerimaan tim penyesuaian neraca** persentase skor tanggapan responden sebesar 69,41 berada dalam interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan yaitu sebesar 47,1%,dari skor tanggapan tersebut terlihat jelas bahwa fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung yakni sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah tidak ditangani oleh tenaga professional sering dengan skor lainya sebagian besar Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak selalu melakukan seleksi penerimaan tim penyesuai neraca. Dengan demikian dapat di katakana bahwa selama ini Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak melakukan seleksi penerimaan tim/pegawai penyesuai neraca dan tim penyesuai atau tim pengelola keuangan daerah tidak professional.

b. **Tim penyesuaian neraca diambil dari orang yang latar belakang tidak mendukung dengan ruang lingkup pekerjaan** persentase skor tanggapan responden sebesar 73,53 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden 38,2% terlihat paling banyak Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung mempunyai tim penyesuaian neraca yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan. Akan tetapi sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki tim penyesuaian neraca dengan latar belakang yang mendukung dengan ruang lingkupnya. Dari hasil persentase yang diperoleh dapat disimpulkan Dinas di Pemerintah

Daerah Kota Bandung tidak memiliki tim penyesuai neraca dengan latar belakang yang tepat dengan profesi akibatnya laporan keuangan yang disajikan tidak benar-benar sesuai prosedur.

3. Melakukan Pengolahan dan Klasifikasi Asset dan Kewajiban Sesuai SAP

Tabel 4.11 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pengolahan dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai SAP.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengolahan dan Klasifikasi Asset dan Kewajiban Sesuai SAP

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Pengumpulan dan pengolahan data guna keperluan penyesuaian pencatatan asset	F	5	7	11	10	1	107	170	62,94	Cukup
	%	14,7	20,6	32,4	29,4	2,9				
Guna keperluan penyesuain pencatatan asset dilakukan pengolahan data berkali-kali	F	1	5	0	20	8	73	170	42,94	Buruk
	%	2,9	14,7	0,0	58,8	23,5				
		Total					**180**	**340**	**52,94**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.11 diatas bahwa pengolahan dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai SAP cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentasi akumulasi jawaban responden sebesar 52,94 berada di interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup.

a. Pengumpulan dan pengolahan data guna keperluan penyesuian pencatatan asset. Persentase skor tanggapan responden sebesar 62,94 berada di interval 52- 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 32,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan melakukan pengumpulan

dan pengolahan data untuk penyesuaian pencatatan asset agar tidak ada kesalahan pencatatan asset yang dimiliki pemerintah hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi mengenai pencatatan asset yang masih kurang. Dan 29,4% sebagian Dinas di Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data hal ini semakin jelas bahwa masalah pencatatan di Pemerintah Daerah Kota Bandung masih harus diperhatikan lagi. Dari hasil persentase diatas dapat disimpulkan Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak benar-benar melakukan pengumpulan dan pengolahan, sehingga laporan keuangan masih ada salah pencatatan.

b. **Kemudian guna keperluan penyesuaian pencatatan asset dilakukan pengolahan data berkali-kali**. Persentase skor tanggapan responden sebesar 42,94 berada di interval 36 – 52 termasuk dalam kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 58,8% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan pengolahan data berkali-kali namun menurut prosedur yang ada penyesuaian asset dilakukan paling tidak 2 kali. Walaupun demikian 14,7% Dinas di Pemerintah Kota Bandung melakukan penyesuain asset sebanyak 2 kali. Dari hasil persentase di atas dapat disimpulkan bahwa SKPD Kota Bandung terlalu berlebihan dalam melakukan penyesuaian dan itu membuang waktu dan tidak sesuai dengan prosedur.

4. Menentukan Ruang Lingkup Pekerjaan

Tabel 4.12 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penentuan ruang lingkup pekerjaan

Tabel 4.12
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penentuan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Menyajikan laporan keuangan,neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan	F	27	3	2	2	0	157	170	92,35	Sangat baik
	%	79,4	8,8	5,9	5,9	0,0				
SKPD menyajikan 4 jenis laporan keuangan	F	3	8	4	10	9	88	170	51,76	Kurang
	%	8,8	23,5	11,8	29,4	26,5				
		Total					**245**	**340**	**72,06**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.12 diatas bahwa menentukan ruang lingkup indikator baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 72,07 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik/tinggi.

a. **Menyajikan laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan** persentase skor tanggapan responden sebesar 92,35 berada di interval 84 – 100 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 79,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung memang menyajikan 3 jenis laporan keuangan tersebut. Namun ada sebagian 5,9% Dinas di Pemerintah Kota Bandung yang menyajikan laporan kurang dari 3 jenis laporan keuangan tersebut bahkan ada yang menyajikan kurang dari 3 jenis laporan keuangan. Dari hasil table diatas dapat disimpulkan bahwa SKPD benar-benar menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP.

b. **SKPD menyajikan 4 jenis laporan keuangan** Persentase skor tanggapan responden sebesar 51,76 berada di interval 36 – 52 termasuk dalam

kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 29,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung menyajikan 4 jenis laporan keuangan,berdasarkan standar pemerintah SKPD menyajikan laporan keuangan paling tidak 3 jenis. Akan tetapi sebagian 23,5% Dinas di Pemerintah Kota Bandung menyajikan 3 jenis laporan keuangan sesuai standar pemerintah.

5. Menyiapkan Formulir-Formulir Berikut Petunjuk Pengisiannya

Tabel 4.13 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Menyiapkan Formulir-Formulir Berikut Petunjuk Pengisiannya

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Petunjuk teknis untuk arahan penyesuaian neraca	F	7	13	6	6	2	119	170	70,00	Baik
	%	20,6	38,2	17,6	17,6	5,9				
Petunjuk teknis berkali-kali dilakukan untuk arahan penyesuaian neraca	F	3	5	5	15	6	86	170	50,59	Buruk
	%	8,8	14,7	14,7	44,1	17,6				
Prosedur penyajian neraca dan cara pengisian formulir ada di petunjuk teknis	F	12	13	6	3	0	136	170	80,00	Baik
	%	35,3	38,2	17,6	8,8	0,0				
		Total					**341**	**510**	**66,86**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.13 diatas bahwa indikator menyiapkan formulir berikut petunjuk pengisiannya cukup. Hali ini dapat diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 66,86 berada di interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup.

a. **Petunjuk teknis untuk arahan penyesuaian neraca** persentase skor tanggapan responden sebesar 70,00 berada dalam interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 38,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan arahan petunjuk teknis untuk penyesuaian neraca agar neraca dapat disajikan sesuai dengan prosedur standar pemerintah. Namun 17,6% sebagian Dinas di Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan petunjuk arahan penyesuaian neraca dengan alasan tim penyesuai sudah mengerti akan petunjuk teknis. Dari hasil persentase dapat disimpulkan Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung benar-benar melakukan apa petunjuk teknis sehingga laporan keuangan disajikan dengan benar.
b. **Petunjuk teknis berkali-kali dilakukan untuk arahan penyesuaian neraca** persentase skor tanggapan responden sebesar 50,59 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 44,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan petunjuk teknis berkali-kali untuk arahan penyesuaian neraca akan tetapi menurut prosedur yang ada petunjuk dilakukan hanya saat melakukan penyusunan neraca. Walaupun demikian 14,7% sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan petunjuk teknis hanya saat neraca di susun.
c. **Prosedur penyajian neraca dan cara pengisian formulir ada di petunjuk teknis** persentase skor tanggapan responden sebesar 80,00

berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 38,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung selalu mengadakan petunjuk teknis disertai cara pengisian formulir dan prosedur penyajian neraca hal ini menujukkan bahwa SKPD Kota Bandung benar-benar memperhatikan penyusunan laporan kauangan.

6. Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data dan Inventarisasi Asset dan Kewajiban

Tabel 4.14 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap butir pernyataan pada indikator pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi asset dan kewajiban.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Inventarisasi Asset dan Kewajiban

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor Actual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Menginventarisasi dokumen atau fisik untuk penyesuaian neraca awal	F	9	2	15	8	0	114	170	67,06	Cukup
	%	26,5	5,9	44,1	23,5	0,0				
		Total					**114**	**170**	**76,06**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.14 diatas bahwa indikator kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 67,06 berada di interval 52 – 68 dan termasuk kategori cukup.

a. Menginventarisasi dokumen atau fisik untuk penyesuaian neraca awal

persentase skor tanggapan responden sebesar 67,06 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban

responden terlihat paling banyak 44,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan akan tindakan melakukan inventarisasi dokumen atau fisik untuk penyesuaian neraca untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi 26,5% sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan iventarisasi dokumen atau fisik untuk penyesuaian neraca awal. Dari hasil persentase dapat disimpulkan bahwa Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak melakukan inventarisasi dokumen, neraca awal tidak pernah disesuaikan.

7. Menyajikan Akun-Akun Asset, Kewajiban dan Ekuitas Berikut Jumlahnya Dalam Format Neraca

Tabel 4.15 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penyajian akun-akun asset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penyajian Akun-Akun Asset, Kewajiban dan Ekuitas Berikut Jumlahnya Dalam Format Neraca

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuain akun-akun asset	F	9	7	15	3	0	124	170	72,94	Baik
	%	26,5	20,6	44,1	8,8	0,0				
Koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun kewajiban dan ekuitas yang sudah sesuai	F	0	2	10	5	17	65	170	38,24	Buruk
	%	0,0	5,9	29,4	14,7	50,0				
		Total					**189**	**340**	**55,59**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.15 diatas bahwa indikator menyajikan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya cukup. Hal ini bisa diketahui dari

persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 55,59 berada di interval 52 – 68 termasuk kategori cukup.

a. **Koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun** asset persentase skor tanggapan responden sebesar 72,94 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 44,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan melakukan koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun asset dan 26,5% melakukan koreksi neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun asset. Dapat disimpulkan bahwa SKPD tidak melakukan koreksi atas neraca, akibatnya aku-akun asset tidak pernah disesuaikan.

b. **Koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun kewajiban dan ekuitas yang sudah sesuai** persentase skor tanggapan responden sebesar 38,24 berada di interval 36 – 52 termasuk dalam kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 50,0% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan koreksi atas neraca yang sudah ada untuk penyesuaian akun-akun kewajiban dan ekuitas yang sudah sesuai. Selebihnya 29,4 meragukan akan koreksi atasneraca yang sudah sesuai, karena neraca yang sudah sesuai tidak harus disesuaikan lagi.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang penyusunan neraca daerah pada SKPD Kota Bandung maka dilakukan

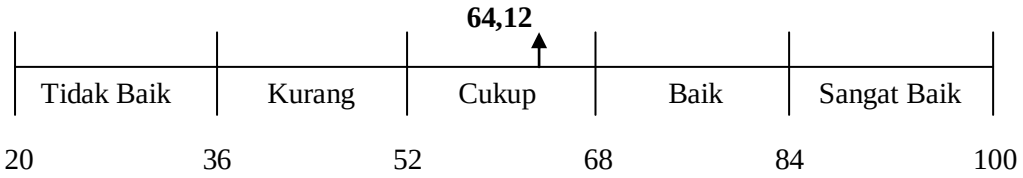
perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Penyajian Neraca Daerah

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Penyesuaian Aset dan Kewajiban	323	510	63,33	Cukup
Penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca	243	340	71,47	Baik
Pengolahan dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai SAP	180	340	52,94	Cukup
Menentukan ruang lingkup pekerjaan	245	340	72,06	Baik
Menyiapkan formulir berikut petunjuk pengisiannya	341	510	66,86	Cukup
Kegiatan Pengumpulan Data dan Inventarisasi asset dan kewajiban	114	170	67,06	Cukup
Penyajian akun-akun asset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya	189	340	55,59	Cukup
Total	**1635**	**2550**	**64,12**	**Cukup**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.16 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1
Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Penyajian Neraca Daerah

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel penyajian neraca daerah sebesar 64,12 berada di antara interval 52 – 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyajian neraca daerah

pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori cukup baik. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca serta penentuan ruang lingkup pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik, namun untuk indikator penilaian penyesuaian asset dan kewajiban yaitu indikator yang pertama mendapat skor rendah sebesar 63,33% dan dengan hasil skor yang semakin mendukung dengan fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Bandung yakni kurangnya penerimaan daerah, volume pekerjaan atau barang serta meningkatnya kerugian daerah karena piutang atau pinjaman atau dana bergulir yang tidak tertagih dikarenakan SKPD Kota Bandung tidak benar-benar melakukan penyesuaian aset dan kewajiban selanjutnya untuk indikator yang ke-2 mengenai penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca dengan skor 71,47% dalam pertanyaan seputar indikator tersebut sebagian SKPD Kota Bandung tidak melakukan seleksi penerimaan tim penyesuai atau penyusun laporan keuangan, serta tim penyesuain neraca tidak diambil berdasarkan latar belakang yang mendukung lingkup pekerjaan dan dapat disimpulkan bahwa tim penyesuai atau penyusun laporan di SKPD Kota Bandung tidak ditangani oleh tenaga profesional dari hasil tersebut sangat mendukung dengan fenomena yang terjadi. Serta dalam indikator ke-3 mengenai pengolahan dan klsifikasi aset dan kewajiban sesuai SAP dengan mendapat skor 52,94% SKPD Kota Bandung tidak melakukan pengolahan dan klasifkasi aset dan kewajiban sesuai SAP dan akibatnya pencatatan aset dan kewajiban masih sangatlah kurang diperhatian dan kerap kali terjadi salah pencatatan, dan hasil tersebut sangat mendukung dengan fenomena yang dikemukakan oleh Madina

Nusrat. Selain dari hasil data yang dianalisis masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyajian neraca daerah seperti transparansi sebab transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan secara langsung diperolah dari mereka yang membutuhkan (Mardiasmo dalam Budi Mulyana). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan juga diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah dalam rangka menjalankan amanat rakyat (Shende dan Bennet). Faktor lainnya yaitu seperti aksesiblitas, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja dikarenakan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitaskan masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperolah laporan keuangan dengan mudah (Sukhemi Akmenika). Jadi kedua faktor-faktor tersebut sama-sama mempengaruhi penyajian neraca daerah.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Pengawasan Intern

Pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pengawasan intern diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 14 butir pernyataan. Berikut

gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indicator.

1. Lingkungan Pengendalian

Tabel 4.17 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator lingkungan pengendalian.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Lingkungan Pengendalian

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Filosofi dan gaya manajemen dalam pengawasan	F	11	10	11	0	2	130	170	76,47	Baik
	%	32,4	29,4	32,4	0,0	5,9				
Usaha manajemen membangun situasi yang kondusif untuk menciptakan integritas	F	4	10	16	4	0	116	170	68,24	Cukup
	%	11,8	29,4	47,1	11,8	0,0				
Pemahaman manajemen akan pengendalian intern	F	5	18	10	0	1	128	170	75,29	Baik
	%	14,7	52,9	29,4	0,0	2,9				
Komitmen manajemen kepada kompetensi personel/karyawan dirasa kurang baik	F	1	18	8	6	1	114	170	67,06	Cukup
	%	2,9	52,9	23,5	17,6	2,9				
Peran direksi dan komite audit	F	6	15	12	1	0	128	170	75,29	Baik
	%	17,6	44,1	35,3	2,9	0,0				
Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab otoritas	F	2	4	23	5	0	105	170	61,76	Cukup
	%	5,9	11,8	67,6	14,7	0,0				
Pembuatan pedoman bagi personel untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik	F	9	20	5	0	0	140	170	82,35	Baik
	%	26,5	58,8	14,7	0,0	0,0				
		Total					**861**	**1190**	**72,35**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.17 diatas bahwa indikator lingkungan pengendalian baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 72,35 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. **Filosofi dan gaya manajemen dalam pengawasan** persentase skor tanggapan responden sebesar 76,47 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden

terlihat paling banyak 32,4% majanemen menggunakan sekaligus meragukan Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung pimpinan atau ketua dinas dan ketua sub bagian menggunakan filosofi dan gaya menajemen yang baik. Namun ada 5,9% sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak menggunakan filosofi dan gaya manajemen dalam pengawasan dan hal itu dapat mengakibatka adanya komunikasi yang tidak baik antar atasan dan bawahan.

b. **Usaha manajemen membangun situasi yang kondusif untuk menciptakan integritas** persentase skor tanggapan responden sebesar 68,24 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 47,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan pimpinan dinas berusaha membangun situasi yang kondusif untuk menciptakan integritas. Walaupun demikian ada 29,4% SKPD Kota Bandung menyajikini ada usaha dari pimpinan dinas membangun situasi yang kondusif.

c. **Pemahaman manajemen akan pengendalian intern** persentase skor tanggapan responden sebesar 79,29 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 52,9% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki ketua dinas dan ketua sub bagian yang memahami akan pengendalian intern. Namun 29,4% sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan memiliki ketua dinas maupun ketua sub bagian yang memahami akan pengendalian intern. Dari hasil persentase di atas

dapat disimpulkan setiap SKPD memiliki pimpinan yang paham akan arti penting pengendalian intern,sehingga pengendalian intern di lingkungan pemerintah kota bandung terkontrol dan baik.

d. **Komitmen manajemen kepada kompetensi personel/karyawan dirasa kurang baik** persentase skor tanggapan responden sebesar 67,06 berada di interval termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 52,9% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung berkomitmen baik kepada kompetensi/karyawan dan sebanyak 29,4 meragukan komitmen atasan kepada kompetensi atau kemampuan karyawan yang kurang baik. Dari hasil persentase yang diperoleh SKPD Kota Bandung memiliki atasan atau pimpinan yang berkomitmen baik kepada komptensi karyawan atau bawahan. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi bahwa pengawasan atasan yang lemah atau kurang bisa memberikan komitmen yang baik kepada komptensi karyawan mengakibatkan integritas merosot.

e. **Peran direksi dan komite audit** persentase skor tanggapan responden sebesar 75,29 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 44,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung berpendapat peran direksi dan komite baik. Namun 35,3% sebagian Dinas di Pemerintah Kota Bandung meragukan peran direksi dan komite audit.

f. **Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab otoritas** persentase skor tanggapan responden sebesar 61,76 berada di interval 52 – 68 termasuk

dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 67,6% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawan otoritas dan 14,7% pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab otoritas tidak dilakukan. Dapat disimpulkan wewenang dan tanggungjawab setiap bagian di SKPD tidak terlaksana dengan baik dan otoritas pemerintah buruk. Hal ini juga bisa menjawab fenomena yang terjadi bahwa pengawasan atasan yang lemah atau dikarenakan tidak bisa mempertanggungjawabkan wewenang dan otoritas instansi mengakibatkan integritas merosot.

g. **Pembuatan pedoman bagi personel untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang baik** persentase skor tanggapan responden sebesar 82,35 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 58,8% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan pembuatan pedomana bagi personel untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang baik dan selebihnya 14,7 meragukan, dari hasil persentase dapat disimpulkan bahwa SKPD Kota Bandung membuata pedoman untuk karyawan untuk pelaksanaan tugas dang tanggung jawab sehingga pelaksaan tugas dan tanggung jawab karyawan menjadi jelas dan dapat meningkatkan akuntabilitas.

2. Penaksiran Risiko

Tabel 4.18 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penaksiran risiko.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penaksiran Risiko

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Penaksiran resiko untuk mengenali resiko dari factor internal maupun ekternal	F	7	12	13	2	0	126	170	74,12	Baik
	%	20,6	35,3	38,2	5,9	0,0				
Kegiatan pimpinan memberikan pengawasan terhadap resiko, menetukan cara bagaimana resiko dihadapi	F	16	10	8	0	0	144	170	84,71	Sangat Baik
	%	47,1	29,4	23,5	0,0	0,0				
		Total					**270**	**340**	**79,41**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.18 diatas bahwa indikator penaksiran resiko baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 79,41 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. **Penaksiran resiko untuk mengenali resiko dari faktor internal maupun ekternal** persentase skor tanggapan responden sebesar 74,12 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 38,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan adanya penaksiran resiko untuk mengenali resiko dari faktor internal maupun ekternal, akan tetapi 35,3% sebagian Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan penaksiran resiko untuk mengenali resiko sehingga kemungkinan ada resiko dapat dihadapi.

b. **Kegiatan pimpinan memberikan pengawasan terhadap resiko, menentukan cara bagaimana resiko dihadapi** persentase skor tanggapan responden sebesar 87,71 berada di interval 84 – 100 termasuk dalam kategori sangat baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden

terlihat paling banyak 47,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan pengawasan, menentukan cara bagaimana resiko dihadapi. Namun 23,5% sebagian Dinas di Pemenrintah Daerah Kota Bandung meragukan kegiatan pimpinan memberikan pengawasan terhadap resiko, menentukan cara bagaimana resiko dihadapi. Dapat disimpulkan SKPD Kota Bandung melakukan pengawasan dengan baik dan menentukan cara bagaimana resiko dihadapi dengan baik.

3. Aktivitas Pengendalian

Tabel 4.19 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator aktivitas pengendalian.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Aktivitas Pengendalian

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Aktifitas pengendalian untuk mendorong akurasi financial reporting, pemisahan tugas,otorisasi,dokumentasi,pengendalian fisik,verifikasi independen kegiatan	F	17	9	8	0	0	145	170	85,29	Sangat baik
	%	50,0	26,5	23,5	0,0	0,0				
Aktifitas pengendalian hanya untuk mendorong kehandalan kinerja dan efektifitas unit kerja pemerintah	F	2	11	6	11	4	98	170	57,65	Cukup
	%	5,9	32,4	17,6	32,4	11,8				
		Total					**243**	**340**	**71,47**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.19 diatas bahwa indikator aktivitas pengendalian baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skot tanggapan responden sebesar 71,47 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. Aktifitas pengendalian untuk mendorong akurasi financial reporting, pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi, pengendalian fisik, verifikasi independen kegiatan persentase skor tanggapan responden sebesar 85,29

berada di interval 84 – 100 termasuk dalam kategori sangat baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 50,0% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan aktifitas pengendalian untuk mendorong akurasi financial reporting, pemisahan tugas, otorisasi, dokumen, pengendalian fisik, verifikasi independen kegiatan. Namun 23,5 meragukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa SKPD Kota Bandung melakukan pengendalian sehingga akurasi financial reporting baik serta pemisahan tugas, otoritasasi, dokumentasi, pengendalian fisik, verifikasi independen kegiatan jelas.

b. **Aktifitas pengendalian hanya untuk mendorong kehandalan kinerja dan efektifitas unit kerja pemerintah** persentase skor tanggapan responden sebesar 57.65 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 32,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa aktifitas pengendalian hanya untuk mendorong kehandalan kinerja dan efektifitas. Namun dengan skor yang sama 32,4% tidak menyetujui bahwa aktifitas pengendalian hanya untuk mendorong kehandalan kinerja dan efektifitas unit kerja. Dari skor yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa SKPD Kota Bandung masih belum mengerti akan fungsi dari aktivitas pengendalian.

4. Komunikasi dan Informasi

Tabel 4.20 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator aktivitas pengendalian.

Tabel 4.20
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Aktivitas Pengendalian

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Aktifitas pengendalian untuk mendorong proses informasi/information processing	F	14	10	8	2	0				
	%	41,2	29,4	23,5	5,9	0,0	138	170	81,18	Baik
		Total					**138**	**170**	**81,18**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.20 diatas bahwa indikator komunikasi dan informasi baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 81,18 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. Aktifitas pengendalian untuk mendorong proses informasi/information processing persentase skor tanggapan responden sebesar 81,18 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 41,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung selalu melakukan aktifitas pengendalian untuk mendorong proses informasi. Dapat disimpulkan pengendalian di SKPD baik dan proses informasi di SKPD Kota Bandung bagus/baik.

5. Pemantauan

Tabel 4.21 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pemantauan.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pemantauan

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Ktiteria
		5	4	3	2	1				
Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan rekonsiliasi dan tindakan yang terkait dalam pelaksanaan tugas	F	6	9	16	3	0				
	%	17,6	26,5	47,1	8,8	0,0	120	170	70,59	Baik
Kurangnya penetapan tujuan kegiatan instansi terkait tujuan dan rencana strategi intansi pemerintah	F	2	20	8	3	1				
	%	5,9	58,8	23,5	8,8	2,9	121	170	71,18	Baik
		Total					**241**	**340**	**70,88**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.21 diatas bahwa indikator pemantuan baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 70,88 dan termasuk kategori baik.

a. **Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan rekonsiliasi dan tindakan yang terkait dalam pelaksanaan** tugas persentase skor tanggapan responden sebesar 70,59 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 47,1% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan adanya pemantauan berkelanjutan, yang diselenggarakan melalui kegiatan rekonsiliasi dan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 26,5% melakukan pemantauan berkelanjutan karena pemantauan dalam lingkup kegiatan rekonsiliasi dan tindakan terkait pelaksanaan tugas masih buruk.
b. **Kurangnya penetapan tujuan kegiatan instansi terkait tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah** persentase skor tanggapan responden sebesar 71,18 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 58,8% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapan tujuan kegiatan instansi terkait tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah cukup baik dan jelas dan 23,5% meragukan adanya penetapan tujuan kegiatan instansi. Dari hasil persetase yang diperoleh dapat disimpulkan SKPD Kota Bandung telah menetapkan tujuan kegiatan

instansi terkait tukuan dan rencana strategi instansi sehingga tujuan yang jelas dan baik serta dapat tercapai.

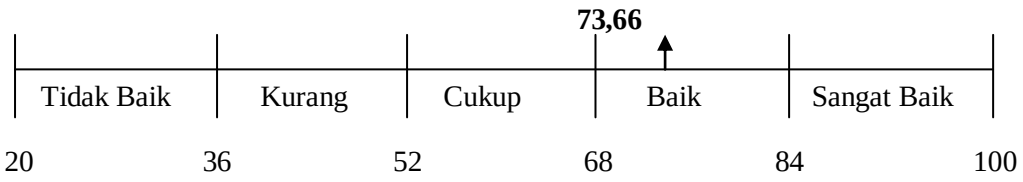
Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir indicator . Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.22
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Intern

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Lingkungan Pengendalian	861	1190	72,35	Baik
Penaksiran Risiko	270	340	79,41	Baik
Aktivitas Pengendalian	243	340	71,47	Baik
Informasi dan Komunikasi	138	170	81,18	Sangat baik
Pemantauan	241	340	70,88	Baik
Total	**1753**	**2380**	**73,66**	**Baik**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.22 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2
Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Pengawasan Intern

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengawasan intern sebesar 73,66 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori baik. Bila dilihat berdasarkan indikator juga tampak bahwa pertanyaan dalam indikator lingkungan pengendalian yakni mengenai komitmen manajemen atau pimpinan kepada kompetensi personel/karyawan dirasa kurang baik dengan skor tanggapan 67,06 berada di interval 52 – 68 termasuk kategori cukup hal ini dapat disimpulkan berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu pengawasan atasan terhadap bawahan yang masih atau masih kurang sehingga integritas karyawan menurun benar terjadi di SKPD Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan belum sepenuhnya karena pimpinan tidak memberikan apresiasi yang bagus kepada karyawan menyebabkan karyawan tidak aktif dalam berbagai kegiatan dan belum adanya komitmen yang baik dari pimpinan kepada kompetensi karyawan sehingga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia kurang, serta belum adanya usaha pimpinan membangun situasi yang kondusif untuk menciptakan integritas. Selain itu masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel pengawasan intern yaitu pelaksanaan audit pemerintah, perilaku profesional yang memadai aparat pengawasan merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan pekerjaanya. Auditor dilandasi dengan kemampuan profesional aparat yang melakukan audit yaitu memiliki

kemampuan/keahlian yang disyaratkan, independen, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat seksa, maksa hasil audit yang dilaksanakan akan lebih baik (Arens et al dalam Dadang Sadeli). Walaupun hasil rekapitulasi skor tanggapan responden pada variabel pengawasan intern menunjukan kategori baik namun kategori baik tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan disetiap indikator.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Akuntabilitas keuangan daerah diukur menggunakan 6 (enam) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 11 butir pernyataan.

1. Akuntabilitas Utuh dan Menyeluruh

Tabel 4.23 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap butir pernyataan pada indikator akuntabilitas utuh menyeluruh.

Tabel 4.23
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Utuh dan Menyeluruh

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Akuntabilitas utuh dan menyeluruh dalam arti tanggung jawab akan pokok dan fungsi intansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepada pemerintah	F	12	14	8	0	0	140	170	82,35	Baik
	%	35,3	41,2	23,5	0,0	0,0				
		Total					**140**	**170**	**82,35**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.23 diatas bahwa untuk indikator bahwa akuntabilitas utuh dan menyeluruh baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor

tanggapan responden sebesar 82,35 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. **Akuntabilitas utuh dan menyeluruh dalam arti tanggungjawab akan pokok dan fungsi isntansi serta program pembangunan yang dipercayakan kepada pemerintah** persentase skor tanggapan responden sebesar 82,35 berada di interval 68 -84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 41,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung mempercayakan tanggung jawab akan pokok dan fungsi instansi serta program pembangunan yang dipercayakan kepada pemerintah dan 23,5% meragukan hal tersebut . Dari persentase diatas dapat disimpulkan bahwa SKPD Kota Bandung benar telah mencapai akuntabilitas yang utuh dan menyeluruh dalam arti tanggungjawab akan pokok dan fungsi dengan baik.

2. Akuntabilitas Mencangkup Aspek Yang Menyeluruh

Tabel 4.24 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mencangkup aspek yang menyeluruh.

Tabel 4.24
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Aspek Yang Menyeluruh

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Akuntabilitas keuangan kurang mencangkup aspek integritas keuangan	F	7	19	7	1	0	134	170	78,82	Baik
	%	20,6	55,9	20,6	2,9	0,0				
Akuntabilitas keuangan mencangkup aspek ekonomis dan sesuai prosedur	F	2	4	17	7	4	95	170	55,88	Cukup
	%	5,9	11,8	50,0	20,6	11,8				
		Total					**229**	**340**	**67,35**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.24 diatas bahwa untuk indikator akuntabilitas mencangkup aspek yang menyeluruh cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 67,35 berada di interval 52 – 68 dan termasuk kategori cukup.

a. **Akuntabilitas keuangan kurang mencakup aspek integritas keuangan** persentase skor tanggapan responden sebesar 78,82 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 55,9% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan sudah mencakup aspek integritas keuangan dan 20,9% meragukan bahwa akuntabilitas sudah mencangkup aspek integritas keuangan. Dapat disimpulkan SKPD Kota Bandung mencapai akuntabilitas keuangan yang mencangkup aspek integritas keuangan, dan selama ini integritas keuangan di SKP Kota Bandung cukup baik.

b. **Akuntabilitas keuangan mencangkup aspek ekonomis dan sesuai prosedur** persentase skor tanggapan responden sebesar 55,88 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 50,0% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan bahwa akuntabilitas keuangan mencangkup aspek ekonomis dan sesuai prosedur, namun ada 20,6% menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan belum mencangkup aspek ekonomis dan sesuai prosedur. Dan dari hasil persentase skor tanggapan

responden bisa diketahui bahwa SKPD Kota Bandung aspek ekonomis yang terkandung dalam akuntabilitas keuangan belum tepenuhi dan akuntabilitas keuangan masih belum sesuai dengan prosedur. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi bahwa akuntabilitas mengalami penurunan dan sebagian SKPD Kota Bandung belum mencapai akuntabilitas keuangan yang baik.

3. Akuntabilitas Merupakan Bagian Dari Sistem Manajemen

Tabel 4.25 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap butir pernyataan pada indikator akuntabilitas bagian dari sistem manajemen.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Bagian Dari Sistem Manajemen

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Sistem manajemen untuk menilai akuntabilitas kinerja maupun unit instansi	F	1	3	23	7	0	100	170	58,82	Cukup
	%	2,9	8,8	67,6	20,6	0,0				
		Total					**100**	**170**	**58,82**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.25 diatas bahwa untuk indikator akuntabilitas meruakan bagian dari sistem manajemen cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skot tanggapan responden sebesar 58,82 berada di interval 52 – 68 dan termasuk kategori cukup.

a. **Sistem manajemen untuk menilai akuntabilitas kinerja maupun unit instansi** persentase skor tanggapan responden sebesar 58,82 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 67,6% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan bahwa sistem manajemen untuk menilai

akuntabilitas kinerja maupun unit instansi dan 20,6% menyatakan bahwa sistem manajemen tidak untuk menilai akuntabilitas kinerja. Maka dapat disimpulkan sistem manajemen yang ada di SKPD Kota Bandung tidak digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja dan secara tidak langsung kinerja Pemerinrah Daerah Kota Bandung diragukan.

4. Akuntabilitas Dibangun Berdasarkan Sistem Informasi Yang Handal

Tabel 4.26 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas Dibangun Berdasarkan Sistem Informasi Yang Handal

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal	F	3	5	17	9	0	104	170	61,18	Cukup
	%	8,8	14,7	50,0	26,5	0,0				
Keabsahan sistem informasi yang membangun akuntabilitas	F	8	11	13	2	0	127	170	74,71	Baik
	%	23,5	32,4	38,2	5,9	0,0				
Objektivitas dan ketepatan sistem informasi yang membangun akuntabilitas	F	10	9	11	4	0	127	170	74,71	Baik
	%	29,4	26,5	32,4	11,8	0,0				
		Total					**358**	**510**	**70,20**	**Baik**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.26 diatas bahwa untuk indikator akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal baik. Hal ini bisa diketahu dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 70,20 berada di interval 68 – 84 dan termasuk kategori baik.

a. Akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal

persentase skor tanggapan responden sebesar 61,18 berada di interval 52 –

68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 50,0% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal dan 26,5% menyatakan bahwa akuntabilitas belum dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal. Dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kota Bandung belum memiliki sistem informasi yang handal untuk membangun akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi yakni sistem informasi yang membangun akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah kota bandung tidak handal.

b. **Keabsahan sistem informasi yang membangun akuntabilitas** persentase skor tanggapan responden sebesar 74,71 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 38,2% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan keabsahan sistem informasi yang membangun akuntabilitas. Namun ada 32,4% menyatakan bahwa sistem informasi yang membangun akuntabilitas sah.

c. **Objektivitas dan ketepatan sistem informasi yang membangun akuntabilitas** persentase skor tanggapan responden sebesar 74,71 berada di interval 68 – 84 termasuk dalam kategori baik. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 32,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan objektivitas dan ketepatan sistem informasi yang membangun akuntabilitas. Namun ada 29,4%

menyakatakan bahwa system informasi yang membangun akuntabilitas sudah objektif dan tepat.

5. Adanya Penilaian Yang Efektif dan Independen

Tabel 4.27 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penilaian yang efektif dan independen.

Tabel 4.27
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penilaian Yang Efektif dan Independen

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Penilaian yang efektif terhadap akuntabilitas suatu isntansi	F	1	4	19	10	0	98	170	57,65	Cukup
	%	2,9	11,8	55,9	29,4	0,0				
Penilaian yang independen terhadap akuntabilitas suatu instansi	F	4	7	11	11	1	104	170	61,18	Cukup
	%	11,8	20,6	32,4	32,4	2,9				
		Total					**202**	**340**	**59,41**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.27 diatas bahwa untuk indikator adanya penilaian yang efektif dan independen cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 59,41 berada di interval 52 – 68 dan termasuk kategori cukup.

a. **Penilaian yang efektif terhadap akuntabilitas suatu instansi** persentase skor tanggapan responden sebesar 57,65 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 55,9% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan penilaian yang efektif terhadap akuntabilitas suatu instansi benar-benar dilakukan 29,4% memang menyatakan tidak melakukan penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi. Dapat disimpulkan bahwa SKPD Kota Bandung tidak melakukan penilaian yang

efektif terhadap akuntabilitas sehingga akutabilitas buruk. Sesuai dengan fenomena yang yang terjadi yakni akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung belum baik dan belum mencapai target salah satu faktornya dalam indicator ini.

b. Penilaian yang independen terhadap akuntabilitas suatu instansi persentase skor tanggapan responden sebesar 61,18 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 32,4% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan melakukan penilaian yang independen terhadap akuntabilitas suatu instansi dan dengan skor yang sama 32,4% menyatakan tidak dilakukannya penilaian yang independen terhadap akuntabilitas. Dari hasil persentase diatas dapat disimpulkan akuntabilitas di SKPD Kota Bandung kurang baik atau cukup. Hal ini sejalan dengan fenomena yang yang terjadi yakni akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung belum baik dan belum mencapai target salah satu faktornya dalam indikator ini dengan tidak melakukannya penilaian secara independen terhadap laporan akuntabilitas keuangan.

6. Adanya Tindak Lanjut Terhadap Laporan Penilaian Atas Akuntabilitas

Tabel 4.28 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tindak lanjut terhadap laporan Penilaian atas akuntabilitas.

Tabel 4.28
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tindak Lanjut Terhadap Laporan Penilaian Atas Akuntabilitas

Pernyataan		Skor Jawaban					Skor aktual	Skor ideal	% Skor	Kriteria
		5	4	3	2	1				
Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas	F	7	6	12	9	0	113	170	66,47	Cukup
	%	20,6	17,6	35,3	26,5	0,0				
Tindak lanjut terhadap laporan atas akuntabilitas diadakan setiap waktu	F	1	8	2	18	5	84	170	49,41	Kurang
	%	2,9	23,5	5,9	52,9	14,7				
		Total					**197**	**340**	**57,94**	**Cukup**

Berdasarkan rekapitulasi distribusi skor hasil tanggapan responden yang dirangkum pada tabel 4.28 diatas bahwa untuk indikator adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor tanggapan responden sebesar 57,94 berada di interval 52 – 68 dan termasuk kategori cukup.

a. **Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas** persentase skor tanggapan responden sebesar 66,47 berada di interval 52 – 68 termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 35,3% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung meragukan melakukan tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas dan 26,5% tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas sehingga selama ini akuntaabilitas menurun. Hal ini juga menunjukkan fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Bandung bahwa akuntabilitas keuangan mengalami penurunan.

b. Tindak lanjut terhadap laporan atas akuntabilitas diadakan setiap waktu persentase skor tanggapan responden sebesar 49,41 berada di interval 36 – 52 termasuk dalam kategori kurang. Kemudian dari distribusi skor jawaban responden terlihat paling banyak 52,9% Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan tindak lanjut terhadap laporan atas akuntabilitas diadakan setiap waktu, dan 23,5% menyatakan tidak melakukan tindak lanjut laporan akuntabilitas setiap waktu dan hanya melakukan penilaian saat ada laporan akuntabilitas yang tidak sesuai.

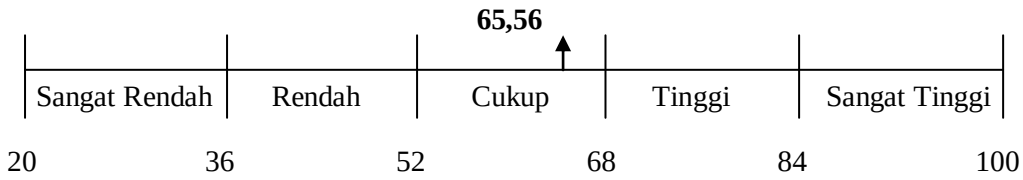
Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang akuntabilitas keuangan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.29
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Akuntabilitas utuh dan menyeluruh	140	170	82,35	Baik
Mencangkup aspek yang menyeluruh	229	340	67,35	Cukup
Akuntabilitas bagian dari sistem manajemen	100	170	58,82	Cukup
Sistem informasi yang handal	358	510	70,20	Baik
Penilaian yang efektif dan independen	202	340	59,41	Cukup
Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas	197	340	57,94	Cukup
Total	**1226**	**1870**	**65,56**	**Cukup**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.29 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.3
Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel akuntabilitas keuangan daerah sebesar 65,56 berada di antara interval 52 – 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori cukup. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa akuntabilitas utuh menyeluruh serta sistem informasi yang handal pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah tinggi. Namun untuk pertanyaan di indikator sistem informasi yang handal terdapat skor 61,18% berada di interval 52 – 68 termasuk kategori cukup dari hasil skor bahwa sistem informasi yang membangun akuntabilitas keuangan tidak handal hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di SKPD Kota Bandung. Kemudian terdapat skor rendah pada setiap pertanyaan dalam indikator akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen terdapat skor 58,82% artinya akuntabilitas masih belum cukup menjadi bagian dari sebuah sistem manajemen. Serta dalam indikator adanya penilaian yang efektif dan independen terdapat skor rendah sebessar 59,41 % berada di interval 52 – 68 termasuk kategori cukup dan dalam indikator yang terakhir yakni tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas terdapat skor 57,94% artinya SKPD Kota Bandung tidak melakukan penilaian yang efektif dan

independen serta tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas dan hal ini sangat mendukung fenomena yang terjadi yaitu akuntabilitas keuangan yang masih buruk atau akuntabilitas masih tidak sepenuhnya tercapai. Dengan kondisi seperti ini diharapkan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah kota bandung lebih ditingkatkan khususnya mengenai penilaian yang independen terhadap laporan akuntabilitas dan penindak lanjutkan laporan atas akuntabilitas. Dan ternyata masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengawasan audit investigasi, dengan melakukan audit investigasi, adanya indikasi ketidak beresan dan unsur perbuatan melanggar/melawan hukum akan terungkap. Hal ini akan berdampak pada kualitas akuntabilitas keuangan yang tidak hanya sekedar mengungkapkan pertanggungjawaban keberhasilan tetapi juga mengungkapkan kegagalan dalam mengelola pengendalian keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas keuangan dikatakan berkualitas bila berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, berisi penilaian kinerja keuangan, dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan, adan adanya tindak lanjut (Mohamad).

4.1.4 Analisis Verifikatif

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh dari penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan

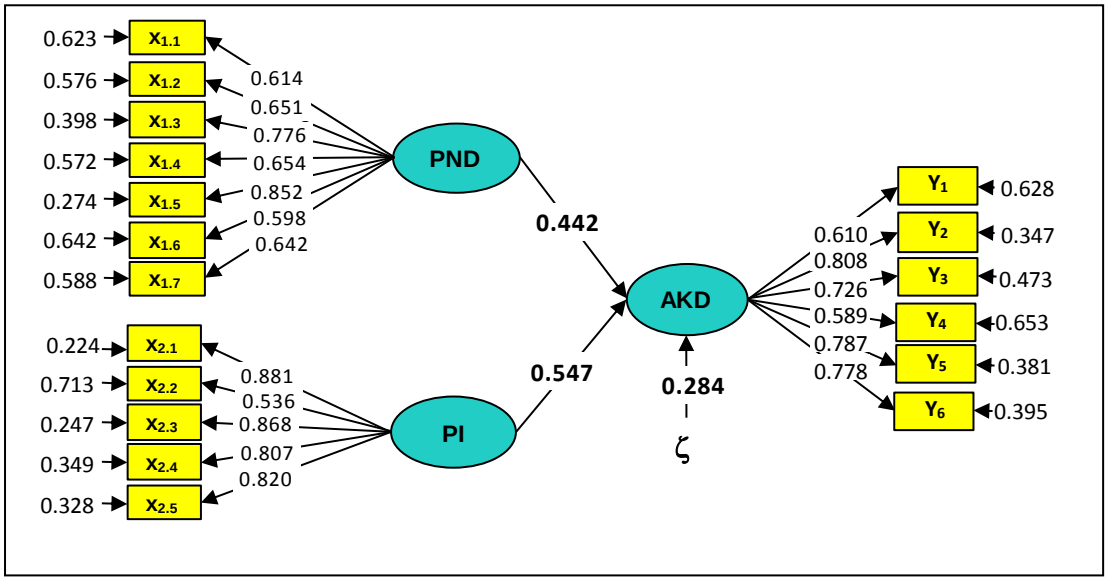
structural equation modeling terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square*.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.4.1 Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 40. Variabel laten penyajian neraca daerah terdiri dari 21 variabel manifes, pengawasan intern terdiri dari 15 variabel manifes dan akuntabilitas keuangan daerah terdiri dari 4 variabel manifes.

Menggunakan metode estimasi *Partial Least Square* diperoleh diagram jalur *full model* pengaruh Penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah seperti terlihat pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4
Koefisien Standarisasi Permodelan Struktural

Melalui bobot faktor yang terdapat pada gambar 4.4 selanjutnya dapat dinilai validitas dari masing-masing indikator serta menguji reliabilitas dari konstruk variabel yang diteliti. Indikator yang memiliki *loading factor* kurang dari 0,50 akan direduksi dari model, sedangkan *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70. Berikut ini disajikan model pengukuran dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. **Model Pengukuran Variabel Penyajian neraca daerah**

   Penyajian neraca daerah tediri dari 21 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel penyajian neraca daerah disajikan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
Bobot Faktor Variabel Penyajian neraca daerah

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Penyesuaian Aset dan Kewajiban	0.614	PND = 0.614 $X_{1.1}$ + 0.623	0.377	2.402
Penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca	0.651	PND = 0.651 $X_{1.2}$ + 0.576	0.424	2.854
Pengolahan dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai SAP	0.776	PND = 0.776 $X_{1.3}$ + 0.398	0.602	6.815
Menentukan ruang lingkup pekerjaan	0.654	PND = 0.654 $X_{1.4}$ + 0.572	0.427	3.914
Menyiapkan formulir berikut petunjuk pengisiannya	0.852	PND = 0.852 $X_{1.5}$ + 0.274	0.726	15.394
Kegiatan Pengumpulan Data dan Inventarisasi asset dan kewajiban	0.598	PND = 0.598 $X_{1.6}$ + 0.642	0.358	3.177
Penyajian akun-akun asset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya	0.642	PND = 0.642 $X_{1.7}$ + 0.588	0.412	4.320
Composite reliability(CR) = 0.862				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.475				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji pada tabel 4.30, hasil bobot faktor (loading factor) untuk ketujuh variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian neraca daerah sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel penyajian neraca daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan dalam merefleksikan variabel penyajian neraca daerah.

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel penyajian neraca daerah sebesar 0,862. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel penyajian neraca daerah sebesar 0,862 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,475

menunjukkan bahwa 47,5% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketujuh indikator) dapat tercermin melalui variabel laten penyajian neraca daerah. Diantara indikator, $X_{1.5}$ (menyiapkan formulir berikut petunjuk pengisiannya) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten penyajian neraca daerah, disusul kemudian $X_{1.3}$ (pengolahan dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai SAP) serta $X_{1.4}$ (menentukan ruang lingkup pekerjaan). Sebaliknya indikator $X_{1.6}$ (kegiatan Pengumpulan Data dan Inventarisasi asset dan kewajiban) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten penyajian neraca daerah.

2. Model Pengukuran Variabel Pengawasan intern

Pengawasan intern terdiri dari 15 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel pengawasan intern disajikan pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31

Bobot Faktor Variabel Pengawasan intern

Variabel Manifest	**Loading factor**	**Measurement model**	**R^2**	**t_{hitung}**
Lingkungan Pengendalian	0.881	PI = 0.881 $X_{2.1}$ + 0.224	0.777	17.934
Penaksiran Risiko	0.536	PI = 0.536 $X_{2.2}$ + 0.713	0.287	2.577
Aktivitas Pengendalian	0.868	PI = 0.868 $X_{2.3}$ + 0.247	0.754	7.990
Komunikasi dan informasi	0.807	PI = 0.807 $X_{2.4}$ + 0.349	0.652	5.259
Pemantauan	0.820	PI = 0.820 $X_{2.5}$ + 0.328	0.672	2.959
Composite reliability(CR) = 0.892				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.628				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji dalam tabel 4.31, hasil bobot faktor (loading factor) untuk kelima belas variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan intern sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel pengawasan intern. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel pengawasan intern.

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel pengawasan intern sebesar 0,892. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel pengawasan intern sebesar 0,892 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kelima belas indikator) dapat tercermin melalui variabel laten pengawasan intern. Diantara kelima belas indikator, $X_{2.1}$ (lingkungan pengendalian) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten pengawasan intern, disusul kemudian indikator $X_{2.3}$ (aktivitas Pengendalian). Sebaliknya indikator $X_{2.2}$ (penaksiran Risiko) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten pengawasan intern.

3. Model Pengukuran Variabel Akuntabilitas keuangan daerah

Akuntabilitas keuangan daerah terdiri dari 4 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel akuntabilitas keuangan daerah disajikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32

Bobot Faktor Variabel Akuntabilitas keuangan daerah

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Akuntabilitas utuh dan menyeluruh	0.640	AKD = 0.640 Y_1 + 0.628	0.410	3.236
Mencangkup aspek yang menyeluruh	0.808	AKD = 0.808 Y_2 + 0.347	0.653	5.586
Akuntabilitas bagian dari sistem manajemen	0.726	AKD = 0.726 Y_3 + 0.473	0.528	3.810
Sistem informasi yang handal	0.589	AKD = 0.589 Y_4 + 0.653	0.347	2.546
Penilaian yang efektif dan independen	0.737	AKD = 0.737 Y_5 + 0.381	0.543	6.376
Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas	0.778	AKD = 0.778 Y_5 + 0.395	0.605	9.134
Composite reliability(CR) = 0.863				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.514				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji dalam tabel 4.32, hasil bobot faktor (loading factor) untuk keenam variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan daerah sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel akuntabilitas keuangan daerah

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,863. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,863 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,514 menunjukkan bahwa 51,4% informasi yang terdapat pada

variabel manifes (keenam indikator) dapat tercermin melalui variabel laten akuntabilitas keuangan daerah. Diantara keenam indikator, Y_2 (mencangkup aspek yang menyeluruh) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten akuntabilitas keuangan daerah. Sebaliknya Y_4 (sistem informasi yang handal) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten akuntabilitas keuangan daerah.

4.1.4.2 Model Struktural

Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel laten exogenous dengan variabel laten endogenous atau hubungan variabel endogenous dengan variabel endogenous lainnya. Berikut rangkuman nilai-nilai yang digunakan dalam model struktural.

Tabel 4.33

Rangkuman Hasil Uji Statistik

Jalur	Koefisien	t_{hitung}*	R-Square
PND ➔ AKD	0,442	3,029	0,716
PI ➔ AKD	0,547	5,003	

*t_{kritis} = 1,96

Penyajian neraca daerah dan pengawasan intern secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 71,6% terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 28,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

4.1.4.2.1 Pengaruh Penyajian neraca daerah Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 4.34
Hasil Pengujian Pengaruh Penyajian neraca daerah Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Ho	Ha
0,442	3,029	1,96	ditolak	diterima

Koefisien jalur antara penyajian neraca daerah (PND) dengan akuntabilitas keuangan daerah (AKD) sebesar 0,442 dengan arah positif artinya semakin baik penyajian neraca daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya koefisien jalur tersebut diuji untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hipotesis:

$H_0 : \gamma_{1.1} = 0$ Penyajian neraca daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .

$Ha : \gamma_{1.1} \neq 0$ Penyajian neraca daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel penyajian neraca daerah (3,029) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar

dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penyajian neraca daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Secara langsung penyajian neraca daerah memberikan pengaruh sebesar 19,5% terhadap akuntabilitas keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 80,5% merupakan factor lainnya seperti seperti transparansi sebab transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan secara langsung diperolah oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo dalam Budi Mulyana) dan aksesiblitas, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja dikarenakan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel para pengguna potensial (Sukhemi Akmenika).

4.1.4.2.2 Pengaruh Pengawasan intern Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Hipotesis ketiga yang akan diuji adalah pengaruh pengawasan intern dan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 4.35

Hasil Pengujian Pengaruh Pengawasan intern Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Koef. Jalur	**t_{hitung}**	**t_{kritis}**	**Ho**	**Ha**
0,547	3,003	1,96	ditolak	diterima

Koefisien jalur antara pengawasan intern (PI) dengan akuntabilitas keuangan daerah (AKD) sebesar 0,547 dengan arah positif artinya semakin baik pengawasan intern akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya koefisien jalur tersebut diuji untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hipotesis:

$H_0 : \gamma_{1.2} = 0$ Pengawasan intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .

$Ha : \gamma_{1.2} \neq 0$ Pengawasan intern secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel pengawasan intern (3,003) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Secara langsung pengawasan intern memberikan kontribusi sebesar 29,9% terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan sisanya sebesar 70,1% merupakan factor lainnya seperti pelaksanaan audit pemerintah dan perilaku profesional yang memadai aparat pengawasan merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik

terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan pekerjaanya (Arens et al dalam Dadang Sadeli).

Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan intern (X2) memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap akuntabilitas keuangan salah satu sebab pengawasan intern sangat mempengaruhi akuntabilitas yakni pengawasan intern dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan pengawasan kegiatan audit pemerintah yaitu manifestasi dari pelaksanaan dan pertanggungjawaban pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengelola keuangan dan operasionalnya. Untuk dapat pertanggungjawaban yang handal diperlukan audit keuangan yang dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau akuntabilitas karena menghadilkan laporan yang independen tentang apakah informasi keuangan yang disusun pemerintah disajikan secara wajar dan serta memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bastian).

4.1.4.2.3 Pengaruh Penyajian neraca daerah dan Pengawasan intern Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan paradigma penelitian maka hipotesis kedua yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4.36

Model Struktural Pengaruh Penyajian neraca daerah dan Pengawasan intern Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	PND	PI	
AKD	$\gamma_{1.1}$PND	$\gamma_{1.2}$PI	+ ζ

Keterangan:

ζ : Pengaruh faktor lain terhadap akuntabilitas keuangan daerah

$\gamma_{1.1}$: Koefisien pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah

$\gamma_{1.2}$: Koefisien pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah

Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS* diperoleh persamaan struktural sebagai berikut.

Tabel 4.37

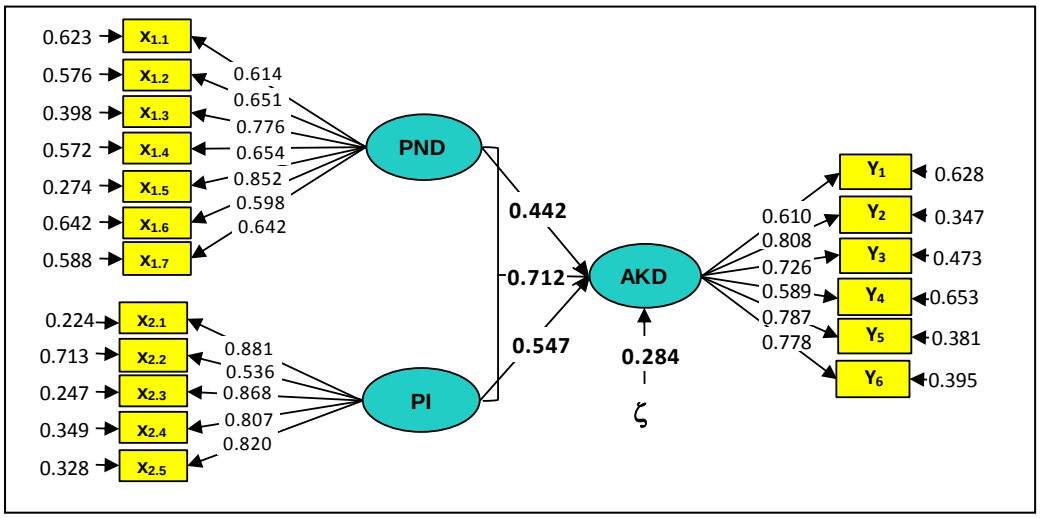
Persamaan Struktural Pengaruh Penyajian neraca daerah, dan Pengawasan intern Terhadap Akuntabilitas keuangan daerah

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	PND	PI	
AKD	0,442	0,547	0,284
	(3,029)	(3,003)	

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.

Secara bersama-sama kedua variabel eksogen (penyajian neraca daerah dan pengawasan intern) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 72,6% terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya sebesar 28,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar kedua variabel eksogen yang diteliti seperti aksesibilitas laporan keuangan, transparansi, pelaksanaan audit pemerintah (Arens et al dalam Dadang

Sadeli). Secara visual diagram jalur pada pengujian hipotesis digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.5

Diagram Jalur Pengujian Hipotesis II

Melalui nilai-nilai koefisien jalur yang terdapat pada gambar 4.5 selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel eksogen (penyajian neraca daerah dan pengawasan intern) terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan hasilnya sebagai berikut.

1. Besar pengaruh "Penyajian neraca daerah" terhadap akuntabilitas keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

   Pengaruh langsung "Penyajian neraca daerah" terhadap akuntabilitas keuangan daerah = $(\gamma_{1.1})^2$ = (0,442) × (0,442) = 0,195 **(19,5%)**

2. Besar pengaruh "Pengawasan intern" terhadap akuntabilitas keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

   Pengaruh langsung "pengawasan intern" terhadap akuntabilitas keuangan daerah = $(\gamma_{1.2})^2$ = (0,547) × (0,547) = 0,299 **(29,9%)**

Diantara kedua variabel independen, pengawasan intern memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dibanding penyajian neraca daerah. Setelah pengaruh masing-masing variabel dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah penyajian neraca daerah dan pengawasan intern berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan daerah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian secara simultan dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

Hipotesis:

H_0 : Semua $\gamma_{1.i} = 0$ i = 1 &2	Penyajian neraca daerah dan pengawasan intern secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .
Ha : Ada $\gamma_{1.i} \neq 0$ i = 1 & 2	Penyajian neraca daerah dan pengawasan intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung .

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F dengan ketentuan tolak Ho jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}, atau sebaliknya terima Ho jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel}. Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R^2) dapat dihitung nilai F dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1X_2)}}{k(1-R^2_{Y(X_1X_2)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(17-2-1)\times 0,716}{2\times(1-0,716)}$$

$$= 17,648$$

Dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;14) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,739. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} (17,648) dan lebih besar dibanding F_{tabel} (3,739), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penyajian neraca daerah dan pengawasan intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan software SmartPLS 2.0 didapatkan koefisien jalur antara penyajian neraca daerah dan akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar 0,442 dengan arah positif dan sesuai dengan hipotesis bahwa penyajian neaca daerah berpengaeuh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, semakin baik pelaksanaan penyajian neraca daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah begitu pula sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budi Mulyana yang menyatakan bahwa penyajian neraca daerah memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi yang menyatakan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh dari penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jumlah persentase yang menunjukan keterkaitan antara penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah yaitu sebesar 19,5%, sisanya merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi seperti transparansi sebab transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan secara langsung diperolah dari mereka yang membutuhkan (Mardiasmo dalam Budi Mulyana). Faktor lainnya yaitu seperti aksesiblitas, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja dikarenakan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel para pengguna potensial (Sukhemi Akmenika). Salah satu konsekuensinya pemerintah harus meningkat transparansi, aksesibilitas dan akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah salah satu persyaratan tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan amat rakyat.

Dengan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terbukti teori dikemukaan oleh Diamond, 2002 penyajian laporan keuangan berupa neraca daerah adalah penting, sebab pemerintah mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian juga diperoleh hasil, dari ketujuh indikator yang pembentuk variabel penyajian neraca daerah, indikator penyesuain asset dan kewajiban, penjelasan kepada tim yang akan menyusun neraca serta pengolahan dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai SAP memiliki peranan penting bagi penyajian neraca diabandingkan dengan indicator lainnya guna mencegah terjadinya adanya piutang yang tidak tertagih, adanya tenaga yang tidak professional serta salah pencatatan, sejalan dengan fenomena yang ada menyebutkan masih kurangnya penerimaan daerah, volume pekerjaan atau barang serta potensi kerugian daerah karena piutang atau pinjaman atau dana bergulir yang tidak tertagih, sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah tidak ditangani oleh tenaga professional, serta masalah pencatatan asset daerah yang masih kurang diperhatikan. Maka dari itu perlu ditingkat lagi mengenaik ketiga indicator tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah yang ada dalam fenomena.

4.2.2 Analisis Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan software SmartPLS 2.0 didapatkan koefisien jalur antara pengawasan intern dan akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar 0,547 dengan arah positif dan sesuai dengan hipotesis bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, semakin baik pelaksanaan pengawasan intern akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah begitu pula sebaliknya, hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dadang Sadeli yang juga

menyatakan bahwa pengawasan fungsional intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh dari pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jumlah persentase yang menunjukan keterkaitan antara penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah yaitu sebesar 29,9%, sisanya merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu pelaksanaan audit pemerintah dan perilaku profesional (Arens et al dalam Dadang Sadeli). Perilaku profesional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai dari korelasi diatas menunjukkan bahwa terbukti teori dikemukaan oleh Muhamad, 2004 menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dikatakan berkualitas bila berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, berisi penilaian kinerja keuangan, dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, adanya penilaian yang efektif dan independen atas akuntabilitas keuangan, ada tindak lanjut serta pengawasan terhadap semua program dan aktivitas pemerintahan.

Berdasarkan penelitian juga diperoleh hasil, dari kelima indikator yang pembentuk variabel pengawasan intern, indikator lingkungan pengendalian,

memiliki peranan penting bagi pengawasan intern dibandingkan dengan indicator lainnya sebab awal melakukan pemeriksaan atau pengawasan dilihat dari lingkungan yang membangun. Sedangkan fenomena yang ada pengawasan atasan yang lemah terhadap bawahan. Akibatnya integritas pimpinan merosot. Maka dari itu perlu ditingkatkan dalam indikator lingkungan pengendalian agar pengawasan semakin baik.

4.2.3 Analisis Penyajian Neraca Daerah dan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan software SmartPLS 2.0 didapatkan antara penyajian neraca daerah dan pengawasan intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar 72,6% dengan arah positif dan sesuai dengan hipotesis bahwa penyajian neraca daerah dan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, semakin baik pelaksanaan penyajian neraca daerah dan pengawasan intern akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah begitu pula sebaliknya. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 28,4%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen yang diteliti seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Hal ini menunjukan bahwa penyajian neraca daerah dan pengawasan intern secara bersama-sama memberikan pengaruh lebih besar terhadap akuntabilitas keuangan daerah jika dibandingkan dengan pengaruh yang diberikan masing-masing variabel secara parsial. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan diatas menunjukkan bahwa terbukti teori dikemukaan oleh Hakim dan

Halim,2008 yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas. Dan teori yang dikemukakan oleh Rosjidi, 2001, Bastian, 2003 kegiatan audit pemerintah adalah termasuk bentuk pelaksanaan pengawasan intern pemerintah kegiatan audit pemerintah adalah manifestasi dari pelaksanaan dan pertanggungjawaban pimpinan Intansi Pemerintah dalam mengelola keuangan dan operasionalnya. Untuk dapat menjamin pertanggungjawaban yang handal (*accountability assurance*) diperlukan audit yang memadai, yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit investigasi. Audit keuangan akan meningkatkan bobot pertanggungjawaban atau akuntabilitas karena menghasilkan laporan yang independen tentang apakah informasi laporan keuangan yang disusun Pemerintah disajikan secara wajar dan serta memenuhi persyaratan kepatuhan perundang-undangan yang berlaku.